



Abdullah Ismail¹
 Saiful Amir²

MODERNISASI PERIKANAN (REVOLUSI BIRU) DAN NASIB NELAYAN

Abstrak

Keinginan pemerintah untuk mengeluarkan masyarakat nelayan dari tekanan-tekanan sosial-ekonomi yang dihadapi masyarakat nelayan pada umumnya, berakar pada beberapa faktor yang kompleks yang saling terkait. Faktor tersebut tidak hanya berkaitan dengan fluktuasi musim-musim penangkapan ikan, keterbatasan sumber daya manusia, modal serta akses, jaringan perdagangan ikan yang eksploitatif terhadap nelayan sebagai produsen. Dengan mengeluarkan kebijakan modernisasi perikanan (revolusi biru) diharapkan agar dapat memacu tingkat produksi dan keuntungan ekonomi secara maksimal bagi masyarakat nelayan, dengan pertimbangan bahwa jika terjadi peningkatan produksi penangkapan akan terjadi peningkatan kesejahteraan nelayan. Ternyata penggunaan teknologi penangkapan yang canggih belum bisa mengangkat masyarakat nelayan keluar dari tekanan-tekanan sosial-ekonomi tersebut. Tulisan ini tujuannya melihat modernisasi perikanan (revolusi biru) dan implikasinya terhadap kemiskinan nelayan. Dengan fokus bahasanya pada modernisasi perikanan memunculkan adanya polarisasi ekonomi nelayan dengan mengelompoknya nelayan pemilik dan nelayan non pemilik alat produksi (buruh) dan relasi antara keduanya (tentang sistem bagi hasil). Bagian akhir tulisan mencoba mengulas bagaimana dampak modernisasi perikanan terhadap degradasi ekologi laut.

Kata Kunci: Modernisasi Perikanan, Nasib Nelayan

Abstract

The government's desire to remove fishing communities from the socio-economic pressures faced by fishing communities in general is rooted in several complex interrelated factors. These factors are not only related to fluctuations in fishing seasons, limited human resources, capital and access, but also fish trade networks that are exploitative towards fishermen as producers. By issuing a fisheries modernization policy (blue revolution), it is expected to be able to spur production levels and maximum economic benefits for fishing communities, with the consideration that if there is an increase in fishing production, there will be an increase in the welfare of fishermen. It turns out that the use of sophisticated fishing technology has not been able to lift fishing communities out of these socio-economic pressures. This paper aims to look at fisheries modernization (blue revolution) and its implications for fishermen's poverty. With its language focus on fisheries modernization, it raises the polarization of fishermen's economy by grouping owner fishermen and non-owner fishermen (laborers) and the relationship between the two (about the profit-sharing system). The final part of the paper tries to review how the impact of fisheries modernization on marine ecological degradation.

Keywords: Fisheries Modernization, Fishermen's Fate

PENDAHULUAN

Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki jumlah pulau sebanyak 17.508 buah dengan panjang pantai 81.000 kilometer (terpanjang kedua setelah Kanada). Dari 67.439 desa di Indonesia, kurang lebih 9.261 desa dikategorikan sebagai desa pesisir. (Kusnadi, 2003). Luas wilayah laut, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif, mencakup 5,8 juta kilometer persegi, atau sekitar tiga per empat dari keseluruhan wilayah Indonesia. (Rokhmin Dahuri, dalam Erni Yustika, 2003). Dilihat dari keadaan geografis tersebut, maka sudah seharusnya Indonesia menyadari dan memanfaatkan potensi kelautan yang demikian

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Maluku Utara
 email: abdullahismailx@gmail.com

besar. Realitas memperlihatkan bahwa hingga saat ini potensi kelautan tersebut belum dimanfaatkan secara optimal sehingga belum mampu memberi sumbangan yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Akan tetapi, dibalik potensi kelautan yang begitu melimpah, justru komunitas nelayan kebanyakan yang menderita. Bahkan kehidupan komunitas nelayan selalu diidentikan dengan kemiskinan.

Menurut data Maret 2006, jumlah total penduduk miskin di Indonesia sekitar 39,05 juta jiwa atau 17,75% dari total penduduk Indonesia 222 juta jiwa. Dengan demikian, jumlah penduduk miskin di kawasan pesisir sebesar 13,45% dari total penduduk miskin Indonesia. (Kusnadi, 2009). Kemiskinan dan tekanan-tekanan sosial-ekonomi yang dihadapi masyarakat nelayan pada umumnya, berakar pada beberapa faktor yang kompleks yang saling terkait. Faktor tersebut tidak hanya berkaitan dengan fluktuasi musim-musim penangkapan ikan, keterbatasan sumber daya manusia, modal serta akses, jaringan perdagangan ikan yang eksploitatif terhadap nelayan sebagai produsen, tetapi juga disebabkan oleh dampak negatif modernisasi perikanan yang mendorong terjadinya pengurangan sumber daya laut secara berlebihan. Proses demikian masih terus berlangsung dan dampak lebih lanjut yang sangat dirasakan oleh nelayan adalah semakin menurunnya tingkat pendapatan mereka dan sulitnya memperoleh hasil tagkapan. (Kusnadi, 2002).

Keinginan pemerintah untuk mengeluarkan masyarakat nelayan dari tekanan-tekanan sosial-ekonomi tersebut dengan mengeluarkan kebijakan modernisasi perikanan (revolusi biru) dengan harapan agar dapat memacu tingkat produksi dan keuntungan ekonomi secara maksimal bagi masyarakat nelayan, dengan pertimbangan bahwa jika terjadi peningkatan produksi penangkapan akan terjadi peningkatan kesejahteraan nelayan. Ternyata penggunaan teknologi penangkapan yang canggih belum bisa mengangkat masyarakat nelayan keluar dari tekanan-tekanan sosial-ekonomi tersebut, malah yang terjadi adalah melahirkan polarisasi ekonomi masyarakat nelayan dengan mengelompoknya nelayan pemilik dan nelayan buruh serta dampaknya pada kerusakan ekologi laut. Adapun temuan penelitian Wance (2019), pemberdayaan rumput laut di Obi (Wance, dkk, 2019), pengembangan dan pengentasan kemiskinan masyarakat desa (Wance, 2022), strategi masyarakat lokal (Putra, dkk, 2024), peran pemerintah daerah dalam mewujudkan Good Governanve (Pelu, dkk, 2023), pengaruh motivasi lingkungan terhadap kinerja (Kasmaludin, dkk, 2023).

Kebijakan modernisasi perikanan (revolusi biru) yang telah ditetapkan dan diimplementasikan oleh pemerintah seperti telah diuraikan di atas, merupakan kebijakan pembangunan yang bersifat top down, yang tidak melibatkan komunitas nelayan dalam memikirkan persoalan-persoalan dan kebutuhan mendesak yang mereka perlukan untuk meningkatkan penghasilan mereka. Dalam paradigma pembangunan yang bersifat top down, kebijakan yang diambil seakan-akan pemerintah sudah mengetahui semua persoalan nelayan sehingga merekalah yang dapat mencari jalan keluarnya, sedangkan nelayan dianggap sebagai orang yang pasif. Dengan kata lain, komunitas nelayan hanya dijadikan sebagai objek dan bukan sebagai subjek pembangunan. Akhirnya, modernisasi perikanan (revolusi biru) hanya menyentuh golongan tertentu, yaitu nelayan kaya dan birokrat pemerintah, sementara nelayan miskin (tradisional) tetap dalam kemiskinannya ternyata mereka tidak memiliki akses, khususnya modal untuk memiliki teknologi tangkap ikan yang diintrodusir melalui modernisasi penangkapan. (Baharuddin, ed, 2005). Oleh karena modernisasi perikanan juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan nelayan kiranya hal ini relevan untuk dikedepankan.

Tulisan ini melihat modernisasi perikanan (revolusi biru) dan implikasinya terhadap kemiskinan nelayan. Dengan fokus bahasanya pada modernisasi perikanan memunculkan adanya polarisasi ekonomi nelayan dengan mengelompoknya nelayan pemilik dan nelayan non pemilik alat produksi (buruh) dan relasi antara keduanya (tentang sistem bagi hasil). Bagian akhir tulisan mencoba mengulas bagaimana dampak modernisasi perikanan terhadap degradasi ekologi laut. Inilah beberapa tujuan kiranya akan menjadi pengarah pembahasan dalam tulisan ini.

METODE

Modernisasi perikanan (revolusi biru) ini merupakan kajian literatur atau dengan mengumpulkan data pustaka. Maka dalam tulisan ini penulis menggunakan pendekatan keputakaan (*library research*) untuk mendapatkan data informasi dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di perpustakaan. Cara dalam mengumpulkan data dalam tulisan ini dengan memanfaatkan buku, laporan hasil penelitian, majalah, koran, dan dokumen-dokumen yang relevan dengan fokus penulisan atau penelitian. Menurut Sugiyono (2007:308), studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, sealai itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Polarisasi Ekonomi Nelayan

Modernisasi perikanan yang dikembangkan oleh pemerintah dipandang pesimis oleh Batke (1988) sebagai mimpi birokrasi (*bureaucratic dream*) atau realitas yang suram (*grim reality*), di mana transisi teknologi yang terencana dengan prioritas pengembangan teknologi berskala kecil (*small scale*) dan tradisional (*piscibusiness*) tidak berdaya dalam meningkatkan sosial-ekonomi nelayan, karena penyimpangan pendistribusian bantuan dan kurang unggulnya kapal motor yang diterima kelompok sasaran. (Satria, 2009). Implikasi transformasi teknologi (revolusi biru) terhadap realitas masyarakat pesisir di mana ketidakberdayaan nelayan tradisional meningkatkan ekonomi, justru berkaitan dengan kecenderungan siasat pembangunan, terutama dalam pemlihan teknologi penangkapan ikan. Hal ini juga berimbas pada polarisasi ekonomi nelayan dengan mengelompoknya nelayan pemilik alat produksi (*majikan*) dan nelayan non pemilik alat produksi (*nelayan buruh*). Mengikuti paparan Baran yang menganut teori Neo-Marxian, relasi antara pemilik alat produksi dan non pemilik alat produksi akan menguntungkan secara sepihak, di mana pemilik mendominasi relasi hubungan sosial ekonomi dan konsekuensinya.

Pernyataan ini sesuai dengan temuan Tatjong M (1986) dan Zulkifli (1989) yang mengisaratkan adanya perilaku irasionalitas nelayan karena ketergantungannya dalam ikatan patron-klien (Satria, 2009). Kuatnya ikatan patron-klien tersebut merupakan konsekuensi dari sifat kegiatan penangkapan ikan yang penuh dengan resiko dan ketidakpastian. Bagi nelayan buruh, menjalin ikatan dengan patron (pemilik alat produksi, pedagang dan pemodal) merupakan langkah yang penting untuk menjaga kelangsungan kegiatannya karena pola patron-klien merupakan institusi jaminan sosial-ekonomi. Hal ini terjadi karena hingga saat ini nelayan belum menemukan alternatif institusi yang mampu menjamin kepentingan sosial-ekonomi mereka.

Secara umum pranata patron-klien merupakan sebuah pranata yang lahir dari adanya saling percaya antara beberapa golongan komunitas nelayan, yaitu pertama, golongan pemilik kapal (*modal ekonomi*) yang berperan sebagai patron. Kedua, yaitu golongan komunitas nelayan yang tidak memiliki modal ekonomi tetapi memiliki modal lain, di antaranya keahlian dan tenaga. Golongan yang memiliki keahlian di antaranya, nakhoda dan teknisi, sedangkan yang memiliki modal tenaga adalah yang berperan sebagai pekerja selain nakhoda dan teknisi. Golongan yang memiliki modal keahlian dan tenaga ini biasa dikenal dengan sebutan “buruh”, yang berperan sebagai klien. Golongan komunitas nelayan yang hanya mengandalkan modal tenaga inilah yang termasuk dalam kategori nelayan miskin, dan merupakan yang terbesar jumlahnya. (Satria, 2009).

Fenomena institusi patron-klien merupakan hal yang umum ditemukan pada masyarakat (baik pertanian maupun maritim). Persistensi institusi patron-klien di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat nelayan, menunjukkan bahwa institusi patron-klien masih berfungsi sentral di tengah-tengah kemajuan masyarakat. Meskipun dalam melaut nelayan tradisional, misalnya tidak memiliki patron, namun nelayan tradisional ini tetap terkait dengan institusi patron-klien dalam hal menjual hasil tangkap ikan. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara nelayan pemilik alat produksi (*majikan*) dengan nelayan non pemilik alat produksi (*buruh*).

Hasil studi Sitorus (1999) tentang relasi implementasi teknologi tangkap ikan dan perubahan struktur sosial ekonomi nelayan di Kecamatan Sibolga Selatan Kotamadya Sibolga, menunjukkan bahwa kesenjangan antara nelayan pemilik dan non pemilik sangat tampak dari pendapatan dan pengeluarannya, di mana hampir sebagian besar pemilik yang dikategorikan dalam kelompok nelayan kaya berpenghasilan atau pengeluaran di atas Rp. 1 juta, sedangkan kelompok nelayan sedang yang terdiri dari para juru mudi berpenghasilan antara Rp. 500 ribu – di bawah 1 juta. Sedangkan para anak buah kapal (ABK) yang bukan pemilik alat produksi termasuk dalam golongan penghasilan atau pengeluaran rendah rata-rata perbulannya di bawah Rp. 500 ribu. Konsekuensi dari hubungan yang tidak seimbang antara nelayan pemilik dan non pemilik tersebut berhubungan pula dengan melebarnya selisih penghasilan, berkurangnya daya tawar ekonomi nelayan non pemilik, terjadinya stratifikasi sosial, serta menetesnya sebab baru polarisasi ekonomi di pedesaan pantai. Selanjutnya, menurut Sitorus, realitas sosial yang digambarkan dari temuannya, justru sejalan dengan pendapat Soemarjan (Nasikun, 1995) yang menyatakan polarisasi ekonomi yang terjadi di kalangan nelayan akan segera diikuti oleh polarisasi sosial, karena desakan-desakan struktural yang tidak dapat dikatup secara aman dengan tindakan kolektif yang tidak disadari perjuangan dan kesadaran perbaikan gradasi kepemilikan. (Satria, 2009). Dari gambaran di atas, dapat dikatakan bahwa dalam proses relasi antar nelayan pemilik alat produksi dan non pemilik alat produksi (buruh), terjadi eksploitasi satu atas lainnya, sehingga nelayan yang kuat atau kaya menikmati kesejahteraan dengan adanya transformasi teknologi perikanan, sebaliknya nelayan tradisional atau buruh yang secara ekonomi lemah dan menderita tidak bisa keluar dari lingkaran kemiskinan yang menjeratnya.

Sistem Bagi Hasil

Dampak modernisasi perikanan menyebabkan ongkos melaut menjadi mahal karena teknologi penangkapan yang digunakan lebih canggih di dibandingkan dengan nelayan-nelayan tradisional. Nelayan non pemilik alat produksi (buruh) bekerja pada unit-unit penangkapan yang dimiliki nelayan-nelayan besar atau pemilik alat produksi yang lebih modern dan canggih. Tetapi tingkat kesejahteraan hidupnya sampai sekarang bisa dikatakan tidak membaik. Didukung dengan ketimpangan sistem bagi hasil antara nelayan pemilik alat produksi dengan nelayan buruh, hal ini lebih besar terjadi pada unit-unit penangkapan yang lebih modern atau canggih sehingga kecenderungan ini sangat merugikan nelayan non pemilik alat-alat produksi (buruh).

Fenomena yang unik dalam hubungan sosial-ekonomi antara nelayan pemilik alat produksi dan nelayan non pemilik alat produksi (buruh) adalah sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil di satu daerah berbeda dengan daerah lain. Hal ini sesuai dengan kesepakatan antara nelayan yang memiliki alat produksi dengan nelayan non pemilik alat produksi (buruh), tetapi pada umumnya sistem bagi hasil ini yang lebih diuntungkan adalah nelayan pemilik/pemodal. Nelayan pemilik/pemodal memperoleh bagian lebih besar dengan pertimbangan atas resiko kehilangan modalnya. Dalam hubungan kerja, pemilik alat produksi secara formal berhubungan dan menjalankan kontrak kerja dengan nelayan non alat produksi (buruh), yakni juru mudi (nakhoda) memimpin awak kapal dan dibantu oleh beberapa anak buah kapal (ABK). ABK menjalankan kerja disaat beroperasi/penangkapan, bertanggungjawab kepada juru mudi (nakhoda).

Bagi hasil dilaksanakan umumnya sebulan, dua bulan atau pada saat terang bulan, tetapi sangat tergantung juga dengan hasil tangkapan selama beroperasi. Berdasarkan pengalaman nelayan waktu terang bulan kesulitan memperoleh hasil tangkapan. Makanya waktu tidak melaut ini dimanfaatkan untuk melaksanakan perhitungan/pembagian hasil yang telah diperoleh selama melaut. Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa sistem bagi hasil di satu daerah kemungkinan berbeda dengan daerah lain. Misalnya, sistem bagi hasil di nelayan Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, hasil penelitian Siswanto (2008:15-17), menggambarkan bahwa hasil penjualan ikan, setelah dipotong biaya operasional, yaitu solar, oli, kerusakan mesin dan lain-lain, hasil bersih di bagi 3 dengan bagian masing-masing sebagai berikut : (1). Juragan sebagai pemodal memperoleh 2/3 bagian. Juragan harus mengeluarkan 10% bagian untuk juru mudi (nakhoda) sebagai “persenan”. (2). Nelayan (juru mudi/nakhoda) tambah Anak Buah Kapal/ABK) memperoleh 1/3 bagian.

Dengan kalimat lain, dalam posisi dan hubungan kerja itu, antara kedua pihak melakukan perjanjian bagi hasil. Pola bagi hasil adalah 2:1 (juragan:nelayan). Juru mudi/nakhoda berbagi dengan para ABK, dengan rincian sebagai berikut : (1). Juru mudi, juru pantau dan tukang johnson (motoris) masing-masing 1,5 bagian. (2). Tukang ngolor (yang menarik tali kolor), tukang pelampung, tukang menarik batu (pemberat) masing-masing 1,25 bagian. (3). Sisa (1,75 bagian) dibagi rata kepada semua. Selain itu juru mudi memperoleh bonus 10% dari hasil bersih penjualan ikan dalam satu bulan. Sedangkan, ABK memperoleh uang lawuhan (uang lauk pauk atau uang makan) dari juragan jika berhasil memperoleh hasil tangkapan ikan.

Pola bagi hasil 2:1 sudah berlangsung lama yakni sejak adanya kapal purse-seine di Prigi. Pola ini dinilai cukup baik dan adil oleh nelayan dan pemilik kapal. Bagian juragan yang besar itu dianggap wajar karena mereka telah membeli kapal dengan harga mahal, harus menanggung (BBM, oli) dan bekal (uang lawuhan) awak kapal selama melaut. Akan tetapi, nelayan mulai menyadari bahwa mereka sedang dieksploitasi oleh nelayan pemilik (juragan/majikan) bahwa sistem bagi hasil yang selama ini mereka sepakati tidak adil, hanya menguntungkan juragan. Juragan kaya mendominasi nelayan buruh miskin. Sebutan juragan itu sendiri mengindikasikan penempatan mereka pada posisi superior dibandingkan nelayan buruh yang inferior.

Sistem bagi hasil yang merugikan nelayan buruh sebagaimana diuraikan di atas, juga sama dengan hasil penelitian Sitorus (1999) di Sibolga, menjelaskan bahwa perbedaan posisi kerja dan sistem bagi hasil juga memtriaskan kesenjangan rata-rata pendapatan nelayan dengan rasio perbandingan 31:3,5:1. Dalam hal ini, rata-rata penghasilan perbulan 16 orang pemilik kapal adalah Rp. 4.975.000,- yang berselisih jauh dengan 7 orang juru mudi sebesar Rp. 547.059,- dan juga sangat kontras bila dibandingkan rata-rata penghasilan yang diperoleh anggota kru (anak buah kapal) yang hanya berjumlah Rp. 159.043,- perbulanya. (Badaruddin, ed, 2005). Dengan sistem bagi hasil tangkapan yang ada, sebenarnya hasil yang diperoleh nelayan buruh tidaklah besar. Apalagi jika ada kerusakan mesin, peralatan tangkap, atau bagian kapal/motor yang lain, biasanya pemilik kapal/motor akan membebankan biaya perbaikan tersebut pada hasil tangkapan yang diperoleh selama melaut sebelum dibagi tiga bagian. Ketentuan ini semakin memperkecil nilai bagi hasil atau pendapatan yang diperoleh nelayan buruh. Secara umum, nelayan buruh tidak puas dengan sistem bagi hasil seperti ini, namun mereka tidak dapat berbuat banyak. Dari data-data sebahagian hasil studi yang ada telah menunjukkan bahwa relasi hubungan nelayan pemilik alat-alat produksi dan nelayan non pemilik alat produksi (buruh) dari perspektif sosial-ekonomi bila dibandingkan dengan nelayan pemilik, maka tingkat kehidupan sosial-ekonomi nelayan buruh sangat rendah bahkan dapat dikatakan sebagai lapisan sosial yang paling miskin di desa-desa pesisir.

Degradasi Ekologi Laut

Kebijakan pembangunan yang dilandasi oleh teori-teori modernisasi telah menimbulkan akselerasi kerusakan sumber daya alam. Persepsi dominan dalam kebijakan pembangunan yang menempatkan sumber daya alam sebagai objek semata untuk memenuhi tuntutan ideologi pertumbuhan ekonomi telah mendorong tindakan yang bersifat over eksploitasi. Sektor ekonomi sebagai “panglima pembangunan” ini secara visioner tidak pernah memikirkan tindakan antisipatifnya terhadap kerusakan lingkungan, yang justru kelak bisa menghentikan jalannya pembangunan nasional. (Kusnadi, 2002). Kebijakan nasional tentang motorisasi perahu dan modernisasi peralatan tangkap perikanan yang biasa dikenal dengan revolusi biru (blue revolution) yang ditempuh pemerintah hampir tiga dasawarsa hanya terkonsentrasi untuk meningkatkan hasil tangkap sumber daya laut (ikan, tanaman, dan lain-lain), justru menyebabkan daya dukung lingkungan menjadi rusak, lebih-lebih hal itu juga mengganggu ekosistem laut. Saat ini masalah terumbu karang, misalnya sudah menjadi persoalan genting di perairan Indonesia karena ekosistemnya terganggu. Akibat eksploitasi yang berlebihan dan tidak mengindahkan manajemen pemanfaatan, terumbu karang terancam habis sehingga berdampak terhadap kerusakan lingkungan laut secara keseluruhan.

Berdasarkan The Status of Coral Reefs of The World 2004, sekitar 20% terumbu karang di dunia rusak dan sulit dipulihkan dengan segera. Jika ini tidak diantisipasi maka diperkirakan pada tahun 2010, yang rusak akan mencapai 40%, dan tahun 2030 bisa mencapai 58%. Kawasan Asia Tenggara sendiri memiliki 34% terumbu karang dunia. Di Asia Tenggara,

Indonesia memiliki luas terumbu karang terbesar, yakni 51.020 km², atau 50% dari total luas terumbu karang Asia Tenggara. Sayangnya, hanya 6% yang dapat dikategorikan sangat baik, dan 30% dalam kondisi parah. (Satria, 2009:67). Sebenarnya, penyebab kerusakan ini bukan hanya diakibatkan oleh aktivitas perikanan akan tetapi juga disebabkan banyak faktor, misalnya : masalah iklim (el nino), pencemaran limbah industri, penambangan, sidimentasi tanah dan diving. Kerusakan lingkungan di sekitar pesisir ini berdampak langsung pada nelayan-nelayan tradisional karena berada pada area basis tangkapan mereka sehingga sulit memperoleh hasil tangkapan, selanjutnya berimbas pada semakin menurunnya tingkat pendapatan mereka.

Pengoperasian peralatan tangkap trawl (pukat harimau) atau mini trawl yang hanya berorientasi pada peningkatan hasil tangkapan (mengejar nilai produktifitas) juga memberi dampak buruk pada ekosistem laut. Menurut Topatimasang (1998) penoperasian alat tangkap trawl dan turunannya merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan ideologi pertumbuhan produktivitas tersebut. Operasi alat tangkap ini tidak hanya memberangus hak-hak tradisional masyarakat adat atau masyarakat lokal di kawasan pesisir akan sumber daya alam setempat, menumpulkan kemandirian ekonomi lokal dan menciptakan kemiskinan, tetapi juga mendorong timbulnya konflik kekerasan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan. Sampai akhir 90-an, di Maluku misalnya, pergolakan masyarakat lokal melawan para pemilik trawl ini terus berlangsung. (Kusnadi, 2009). Dalam jangkang panjang, pengoperasian alat tangkap trawl atau mini trawl akan terjadi penyusutan sumber daya laut yang berakibat pada menurunnya hasil tangkap dan kelangsungan usaha nelayan, baik itu nelayan-nelayan tradisional, nelayan besar/modern dan nelayan buruh. Namun, yang paling merasakan kerugian dari operasi alat tangkap trawl atau mini trawl adalah nelayan-nelayan kecil atau nelayan tradisional.

Nelayan-nelayan tradisional juga berperan besar dalam perusakan ekosistem laut. Hasrat untuk memperoleh hasil tangkapan yang besar juga telah mendorong nelayan-nelayan tradisional menggunakan tehknik-tehknik penangkapan yang merusak kelestarian sumber daya hayati laut. Diberbagai perairan, kegiatan pengeboman ikan masih terus berlangsung. Demikian juga penggunaan potasium sianida untuk penangkapan jenis-jenis ikan bernilai ekonomis tinggi dihambat terumbu karang telah menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang parah. Nelayan-nelayan tersebut menyadri bahwa engeboman dapat merusak lingkungan, tetapi mereka tidak mampu menghentikannya karena tuntutan kebutuhan ekonomi yang mendesak. (Kusnadi, 2002). Selain terumbu karang, ekosistem hutan bakau juga mengalami degradasi yang cukup mengkhawatirkan. Menurut Dahuri et. al, dalam Satria (2009), luas hutan bakau di Indonesia dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan. Selama periode 1982 – 1993, telah terjadi penurunan luas hutan bakau dari sekitar 4 juta hektar menjadi sekitar 2,5 juta hektar. Tentu hingga tahun 2003 luas hutan itu semakin menurun.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa laut kita sebagai sumber kehidupan para nelayan saat ini dalam keadaan memprihatinkan. Pertanyaannya mengapa laut kita rusak? Dalam perspektif filsafat lingkungan, kerusakan tersebut terjadi sebagai konsekuensi dominasi pendekatan antroposentrisme dalam pembangunan ekonomi dan kegiatan kelautan. Seperti dijelaskan Keraf (2002), pendekatan antroposentrisme memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta sehingga manusia dan kepentingannya merupakan nilai tertinggi yang harus diperhatikan. Sementara makhluk lain di alam ini akan mendapat nilai dan perhatian sejauh menunjang kehidupan manusia. Dalam pendekatan ini, pola hubungan manusia dengan alam merupakan relasi instrumental, yakni alam hanya dilihat sebagai alat bagi kepentingan manusia. Tidak ada tanggungjawab etis manusia terhadap alam karena etika hanya berlaku bagi manusia. Tentu saja, pendekatan antroposentrisme ini menyebabkan manusia mengeksploitasi sumber daya laut demi kepentingan hidupnya tanpa ada perhatian untuk memperlakukan lingkungan biotik dan abiotik laut secara etik. Wujudnya adalah pengerukan pasir laut sehingga meyebabkan punahnya deversitas spesies ikan, rusaknya terumbu karang. Begitu pula praktik pengeboman dalam penangkapan ikan yang merusak ekosistem karang, reklamasi pantai yang menggundulkan mangrove, dan pembangunan darat lainnya yang berdampak terhadap laut. (Satria, 2009).

SIMPULAN

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dengan pendekatan modernisasi alat tangkap perikanan dan motorisasi perahu yang biasa dikenal dengan “revolusi biru/blue revolution” yang telah berlangsung selama ini telah memberikan dampak terhadap perubahan-perubahan dalam kehidupan sosial-ekonomi nelayan. Dalam proses perubahan sosial-ekonomi tersebut tidak semua lapisan masyarakat nelayan bisa memanfaatkannya atau menikmatinya, untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Karena ketika nelayan mulai menggunakan alat tangkap modern konsekuensinya harus ada ketersediaan banyaknya modal ekonomi dan biaya-biaya kemanusiaan. Kondisi inilah yang menyebabkan lapisan masyarakat nelayan yang non memiliki alat-alat produksi (buruh) kurang mampu memanfaatkan peluang yang ada dalam persaingan merebut sumber daya kelautan atau perikanan dengan nelayan yang memiliki alat-alat produksi. Keterbatasan yang dimiliki nelayan buruh inilah, maka dalam struktur sosial masyarakat nelayan dikategorikan sebagai kelompok sosial yang sangat tidak diuntungkan atau paling miskin di wilayah pesisir.

Dampak kebijakan modernisasi perikanan dan pembangunan di sektor lain (misalnya: perindustrian, pertambangan dan lain-lain) selama ini telah menurunkan kualitas lingkungan (ekologi) laut dan pesisir beserta beragam sumber daya yang terkandung di dalamnya. Kondisi ini juga telah menyumbangkan penderitaan bagi masyarakat nelayan, baik yang memiliki alat produksi (nelayan modern dan kecil atau tradisional) serta nelayan yang tidak memiliki alat-alat produksi (buruh).

DAFTAR PUSTAKA

- Badaruddin (ed.), 2005, *Isu-isu Kelautan Dari Kemiskinan Hingga Bajak Laut*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Erni Yustia, Ahmad, 2003, *Negara vs Kaum Miskin*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Kusnadi, 2002, *Konflik Sosial Nelayan, Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan*, Yogyakarta, LKiS.
- Kusnadi, 2008, *Akar Kemiskinan Nelayan*, Yogyakarta, LKiS.
- Kasmaludin, K., Muh, B.A. and Junaid, G., 2023. Pengaruh Motivasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Selatan. *Journal of Government Science Studies*, 2(1), pp.14-21.
- Kusnadi, 2009, *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*, Yogyakarta, Ar-Ruzz Media.
- La Suhu, B., & Wance, M. 2019. Pemberdayaan masyarakat petani rumput laut di kabupaten halmahera selatan (studi desa mano kecamatan obi selatan). *JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, 4(2), 156-172.
- Putra, A., Rosdialena, R., Prasetya, B., Ahmad, R., Jelisae, S.K. and Wardiman, J., 2024. Strategi Masyarakat Lokal dan Pedagang Dalam Menciptakan Kenyamanan Bagi Wisatawan. *Journal of Government Science Studies*, 3(1), pp.60-67.
- Pelu, A., Madubun, J. and Wance, M., 2023. Peran Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintah Negeri Hila Kabupaten Maluku Tengah. *Journal of Government Science Studies*, 2(2), pp.124-139.
- Rasman Manafi, Muh, dkk, 2021. *Menata Ruang Laut Indonesia*, Jakarta, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Republik Indonesia.
- Siswanto, Budi, 2008, *Kemiskinan dan Perlawanan Kaum Nelayan*, Surabaya, Laksbang Mediatama.
- Satria, Arif, 2009, *Ekologi Politik Nelayan*, Yogyakarta, LKiS.
- Wance, M. 2022. Analisis Permasalahan Pemerintahan, Pengembangan Bumdes, Kemiskinan Masyarakat desa dan Solusi yang ditawarkan Melalui Edukasi Kepada Masyarakat dan Praktek Kuliah Lapangan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 2(5), 230-238.